

Optimalisasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaksanaan Program dan Penganggaran pada Poltekkes Kemenkes Mamuju

Muh. Firdaus^{1*}, Andi Sinrang¹, Muhammad Nur¹

1. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia.

*Correspondence author: muh.firdaus101086@gmail.com

Abstract. The digitalization of public financial management has become a strategic imperative in Indonesia, exemplified by the implementation of the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). This study examines the optimization of SAKTI implementation at Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Mamuju, with the objectives of analyzing the level of SAKTI utilization and identifying obstacles alongside their solutions. Employing a qualitative research design with data collection through observation, in-depth interviews with five informants, and library research, this study analyzed findings using the Miles and Huberman model. The theoretical framework is grounded in Diffusion of Innovations (DOI) Theory by Rogers (2003), with analysis structured around five attributes: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. Results reveal that SAKTI utilization remains limited to core financial units and has not been evenly distributed across all work units. Key constraints include limited human resource capacity in digital literacy, inadequate IT infrastructure, bureaucratic resistance to change, unstable network connectivity, and data synchronization issues. These findings indicate that SAKTI adoption remains administrative in character rather than institutionally embedded. Optimization requires a comprehensive approach encompassing capacity building, infrastructure upgrades, and organizational change management.

Keyword: diffusion of innovations; digital transformation; government financial information system; e-government; public financial management

How to Cite:

Firdaus, M., Sinrang, A., & Nur, M. (2026). Optimalisasi Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pelaksanaan Program dan Penganggaran pada Poltekkes Kemenkes Mamuju. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 9-17. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.11.1.2026.9-17>

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, digitalisasi keuangan publik telah menjadi isu strategis di berbagai negara sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi tata kelola keuangan negara. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang rentan terhadap kesalahan manusia dan penyalahgunaan wewenang (Handayani et al., 2021). Transformasi digital di sektor keuangan publik tidak sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh aspek fundamental tata kelola negara, yakni bagaimana sumber daya publik dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (World Bank, 2022). Dalam konteks ini, sistem informasi keuangan berbasis digital menjadi instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah merespons dinamika kebijakan fiskal secara lebih cepat dan terkoordinasi. Di Indonesia, urgensi transformasi sistem keuangan negara semakin mengemuka seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan anggaran di berbagai instansi pemerintah, dari

pusat hingga unit pelaksana teknis di daerah. Laporan World Bank (2022) menegaskan bahwa negara-negara berkembang yang mengadopsi sistem keuangan digital terintegrasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam transparansi fiskal dan efisiensi belanja publik dibanding yang masih mengandalkan sistem manual dan terfragmentasi.

Sebagai bagian dari reformasi keuangan negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai solusi terintegrasi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah. SAKTI dirancang untuk menyelaraskan seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu sistem berbasis teknologi informasi yang terkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Sistem ini mengintegrasikan beberapa modul penting termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Implementasi SAKTI secara nasional diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, yang mewajibkan seluruh satuan kerja pemerintah untuk menggunakan SAKTI sebagai satu-satunya instrumen pengelolaan keuangan tingkat instansi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kebijakan ini merupakan lompatan besar dalam standardisasi sistem keuangan negara, sekaligus tantangan bagi ribuan satuan kerja yang memiliki variasi kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi yang sangat beragam. Rahman et al. (2023) mencatat bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi SAKTI di lapangan menunjukkan disparitas yang signifikan antara satuan kerja di pusat dan di daerah, khususnya dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung (Rahman et al., 2023).

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Mamuju, sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah Sulawesi Barat, memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan anggaran karena tidak hanya mencakup pembiayaan operasional pendidikan, tetapi juga dukungan terhadap layanan kesehatan, penelitian medis, dan program pengabdian masyarakat. Sebagai institusi yang berlokasi di wilayah yang secara infrastruktur dan SDM masih dalam tahap pengembangan, Poltekkes Kemenkes Mamuju menghadapi tantangan ganda: memenuhi kewajiban regulasi penggunaan SAKTI di satu sisi, dan mengatasi keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan di sisi lain. Implementasi SAKTI di institusi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis (Iskandar & Amriani, 2021). Berbeda dari satuan kerja kementerian teknis di ibu kota provinsi yang umumnya memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan dan dukungan teknis, satuan kerja pendidikan kesehatan di daerah seperti Poltekkes Mamuju harus berhadapan dengan kendala konektivitas jaringan, keterbatasan perangkat, dan minimnya tenaga IT yang kompeten. Kondisi ini menciptakan kesenjangan implementasi yang tidak dapat diabaikan dalam evaluasi kebijakan digitalisasi keuangan negara secara nasional. Studi mendalam terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi implementasi SAKTI yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman kapasitas satuan kerja di seluruh Indonesia.

Meskipun studi tentang SAKTI telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir (Gultom & Harahap, 2024; Hadi et al., 2024; Nugroho & Lestyowati, 2020), sebagian besar penelitian berfokus pada instansi kementerian teknis di pusat atau di kota besar, sehingga perspektif dari satuan kerja pendidikan kesehatan di wilayah timur Indonesia masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat pemanfaatan aplikasi SAKTI dalam pelaksanaan program dan penganggaran di Poltekkes Kemenkes Mamuju; dan (2) mengidentifikasi kendala yang menghambat

implementasi serta solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan kerangka Diffusion of Innovations Theory (DOI) dari Rogers sebagai landasan analisis, yang terbukti relevan dalam mengkaji adopsi inovasi teknologi dalam konteks organisasi publik. Dengan memahami hambatan dan peluang yang ada di lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang operasional dan berbasis bukti bagi Poltekkes Kemenkes Mamuju maupun satuan kerja serupa lainnya dalam mengoptimalkan penerapan SAKTI.

2. Konsep

Pengelolaan Keuangan Publik dan Good Governance

Pengelolaan keuangan publik merupakan disiplin dalam administrasi publik yang berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut World Bank (2022), pengelolaan keuangan publik merupakan serangkaian kebijakan, proses, dan praktik yang memastikan sumber daya fiskal negara digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pendapatan negara, pelaksanaan dan pengelolaan kas, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta audit dan pengawasan (Laudon & Laudon, 2020). Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif, di mana setiap satuan kerja pemerintah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Prinsip good governance menjadi landasan pengelolaan keuangan publik yang baik. Menurut Sabani et al. (2023), good governance menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum (Sabani et al., 2023). Penerapan sistem keuangan berbasis teknologi seperti SAKTI merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks satuan kerja seperti Poltekkes Kemenkes Mamuju, implementasi SAKTI secara langsung berkontribusi pada pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena setiap transaksi keuangan tercatat secara real-time dan dapat diverifikasi oleh KPPN maupun Kementerian Keuangan pusat. Namun demikian, terwujudnya good governance melalui SAKTI mensyaratkan tidak hanya kepatuhan teknis terhadap sistem, tetapi juga internalisasi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam budaya kerja birokrasi sehari-hari (Rahman et al., 2023).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI merupakan platform digital yang dikembangkan Kementerian Keuangan RI untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses keuangan di tingkat instansi pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan dalam satu sistem terpadu. SAKTI mengintegrasikan tujuh modul utama: modul penganggaran, komitmen, pembayaran, pelaporan, bendahara, aset tetap dan persediaan, serta administrasi dan user management.

Sebelum SAKTI, pengelolaan keuangan di banyak instansi dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang terfragmentasi sehingga sering menghambat efektivitas pengelolaan anggaran (Rahmadany, 2024). Penerapan SAKTI bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan keuangan negara melalui standarisasi prosedur, integrasi data real-time dengan SPAN, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.

Transformasi Digital dan Adopsi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah

Transformasi digital dalam sektor publik merujuk pada proses pengintegrasian teknologi informasi ke dalam seluruh aspek operasional pemerintahan, yang menghasilkan perubahan mendasar dalam cara layanan disampaikan dan kebijakan diimplementasikan (Laudon & Laudon, 2020). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, transformasi digital diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mampu menghubungkan seluruh proses keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam satu platform yang terkonsolidasi. Keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi yang diadopsi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur yang memadai (Handayani et al., 2021).

Adopsi sistem informasi keuangan pemerintah di negara berkembang, termasuk Indonesia, kerap dihadapkan pada tantangan struktural yang kompleks. Sabani et al. (2023) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti literasi digital aparatur, kualitas infrastruktur TI, dan dukungan kebijakan pimpinan merupakan penentu utama keberhasilan adopsi e-government di negara berkembang. Dalam konteks SAKTI, tantangan ini semakin nyata pada satuan kerja yang berada di luar pusat administrasi nasional, di mana kesenjangan kapasitas antara kebijakan yang diamanatkan secara nasional dengan kesiapan lokal seringkali menciptakan implementasi yang bersifat formalitas semata. Nugroho dan Lestyowati (2020) menegaskan bahwa tingkat kepuasan dan manfaat yang dirasakan pengguna merupakan indikator kritis dalam menilai keberhasilan implementasi sistem keuangan digital, dan bahwa persepsi negatif yang terbentuk di awal adopsi cenderung bersifat persisten apabila tidak segera ditangani melalui intervensi pelatihan dan perbaikan sistem yang terstruktur (Nugroho & Lestyowati, 2020).

Diffusion of Innovations (DOI) Theory

Diffusion of Innovations (DOI) Theory yang dikembangkan Rogers merupakan kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana inovasi dikomunikasikan dan diadopsi dalam suatu sistem sosial. Teori ini mengidentifikasi lima atribut inovasi yang menentukan keberhasilan adopsi: (1) Relative Advantage (keunggulan relatif), yaitu sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dibanding sistem lama; (2) Compatibility (kompatibilitas), yaitu kesesuaian inovasi dengan nilai dan praktik yang sudah berjalan; (3) Complexity (kompleksitas), yaitu tingkat kesulitan memahami dan menggunakan inovasi; (4) Trialability (kemampuan dicoba), yaitu sejauh mana inovasi dapat diujicobakan secara terbatas; dan (5) Observability (kemudahan diamati), yaitu sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat oleh orang lain (Rogers, 2003).

Dalam konteks implementasi SAKTI, kelima atribut ini menjadi penentu kecepatan dan kedalaman adopsi sistem oleh aparatur pemerintah. Rendahnya persepsi terhadap salah satu atribut misalnya kompleksitas yang tinggi atau kompatibilitas yang rendah dapat menghambat proses adopsi secara keseluruhan (Hadi et al., 2024). Oleh karena itu, DOI Theory dipilih sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika implementasi SAKTI di Poltekkes Kemenkes Mamuju.

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa institusi ini merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah timur Indonesia dengan karakteristik yang berbeda dari institusi sejenis di wilayah perkotaan, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan berbasis teknologi dalam konteks daerah. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam implementasi SAKTI. Lima informan yang terpilih adalah: (1) Bendahara Pengeluaran, (2) Staf IT, (3) Pejabat Pengelola Keuangan, (4) Auditor/Pihak Eksternal, dan (5) Staf administrasi unit non-keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: (1) observasi non-partisipan untuk mengamati praktik penggunaan SAKTI secara langsung; (2) wawancara mendalam dan tidak terstruktur dengan seluruh informan untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Creswell & Creswell, 2022); dan (3) studi pustaka terhadap jurnal nasional dan internasional, laporan kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, serta dokumen regulasi terkait. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2020). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan mengonfirmasi temuan dari wawancara melalui observasi langsung dan dokumen pendukung.

4. Hasil dan Pembahasan

Tingkat Pemanfaatan SAKTI

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan aplikasi SAKTI telah berjalan pada unit-unit inti pengelolaan keuangan, terutama dalam operasionalisasi modul komitmen, pembayaran, dan pelaporan. Modul bendahara juga telah digunakan secara rutin untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Sementara itu, modul aset tetap dan persediaan belum dimanfaatkan secara optimal, dan modul penganggaran masih sangat bergantung pada satu operator utama. Pemanfaatan secara keseluruhan belum merata di seluruh unit kerja. Terdapat ketergantungan tinggi pada operator tertentu sehingga sistem belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus kerja lintas unit.

Informan 1 (Bendahara Pengeluaran) menyatakan: "Kami di bagian keuangan sudah cukup terbiasa, tapi unit lain masih banyak yang belum tahu cara input. Padahal sistem ini bisa diakses langsung oleh semua unit." Pernyataan ini menggambarkan ketimpangan penguasaan sistem di antara personel internal. SDM dari unit non-keuangan cenderung tidak dilibatkan secara langsung, sehingga proses digitalisasi menjadi terpusat pada beberapa personel saja, menimbulkan beban kerja yang tidak proporsional. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan titik kegagalan tunggal (single point of failure): apabila operator utama berhalangan, seluruh proses input dan pelaporan keuangan dapat terhenti. Informan 4 (Auditor) mengonfirmasi bahwa pola pemusatan ini menjadi salah satu catatan dalam temuan audit internal, karena tidak mencerminkan prinsip segregasi tugas yang seharusnya melekat dalam sistem pengelolaan keuangan yang sehat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi operator dan staf pengelola anggaran menjadi faktor dominan dalam kelancaran implementasi SAKTI, dan bahwa kurangnya pelatihan fungsional serta ketergantungan pada satu-dua personel teknis merupakan kendala utama yang menyebabkan sistem berjalan tidak optimal. Iskandar dan Amriani (2021) menambahkan bahwa tingkat pemanfaatan SAKTI yang rendah secara langsung berkorelasi dengan rendahnya net benefit yang dirasakan oleh organisasi, karena sistem tidak dapat menghasilkan nilai strategis apabila hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan administratif semata. Oleh karena itu, perluasan pemanfaatan SAKTI ke seluruh unit kerja bukan

sekadar tuntutan teknis, melainkan prasyarat fundamental untuk mewujudkan pengelolaan keuangan berbasis data yang sesungguhnya (Kementerian Keuangan RI, 2022a).

Analisis Berdasarkan DOI Theory

Relative Advantage (Keunggulan Relatif)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap keunggulan relatif SAKTI belum sepenuhnya terbentuk di tingkat pengguna. Meskipun secara teoritis sistem ini menawarkan efisiensi dan transparansi, dalam praktiknya pengguna lebih sering menghadapi kesulitan teknis. Informan 1 menyampaikan: "Kalau jaringannya lancar, memang lebih cepat karena tidak perlu bolak-balik antar dokumen. Tapi sering kali aplikasinya lambat, atau tiba-tiba error."

Hasil observasi menunjukkan bahwa keunggulan SAKTI lebih dirasakan di tingkat struktural (pelaporan ke Kemenkeu atau KPPN) dibandingkan tingkat operasional unit kerja. Waktu yang dihabiskan untuk troubleshooting teknis dan penyesuaian format justru mengurangi efisiensi kerja harian. Gultom dan Harahap (2024) menegaskan bahwa keunggulan relatif sistem informasi keuangan hanya dapat dirasakan ketika sistem berjalan optimal dan didukung kesiapan sumber daya serta infrastruktur yang memadai (Gultom & Harahap, 2024). Dalam perspektif DOI, rendahnya relative advantage mendorong pengguna mempertahankan sistem lama, yang melemahkan integritas sistem secara keseluruhan.

Compatibility (Kompatibilitas)

Kompatibilitas antara SAKTI dan sistem kerja yang sudah ada di Poltekkes masih tergolong rendah. SAKTI sebagai aplikasi berbasis digital yang terintegrasi secara nasional belum sepenuhnya sesuai dengan kebiasaan kerja manual yang telah berlangsung lama. Informan 3 mengungkapkan: "Pegawai yang sudah lama di sini biasanya lebih nyaman kerja manual. Kalau sistem ini banyak menu, banyak klik. Mereka merasa tidak cocok dengan gaya kerja yang cepat berubah."

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa proses input data, persetujuan anggaran, hingga pelaporan masih banyak dilakukan dengan berkas fisik atau spreadsheet manual. Perubahan drastis ke sistem digital dianggap sebagai gangguan, bukan penyederhanaan. Nugroho dan Lestyowati (2020) menemukan hal serupa, bahwa sistem baru cenderung tidak kompatibel dengan struktur kerja hirarkis berbasis dokumen fisik yang sudah terbiasa digunakan oleh aparatur. Rendahnya compatibility dalam perspektif DOI memperlambat adopsi dan menciptakan dualisme sistem: penggunaan digital secara formal namun operasional tetap konvensional.

Complexity (Kompleksitas)

Aplikasi SAKTI dipersepsikan sebagai sistem yang kompleks, terutama oleh pegawai tanpa latar belakang teknologi informasi. Kerumitan ini tercermin dari struktur modul yang berlapis, alur input data yang panjang, dan antarmuka yang dinilai kurang ramah pengguna. Informan 1 menyatakan: "Terlalu banyak tahapan dalam satu proses. Untuk buat satu dokumen saja harus buka beberapa modul, klik beberapa kali, dan harus tahu urutannya."

Observasi juga mengungkap bahwa sebagian besar pengguna masih mengandalkan catatan manual sebelum melakukan input ke sistem, menunjukkan bahwa mereka belum percaya diri bekerja langsung dalam sistem digital. Hadi et al. (2024) menyimpulkan bahwa SAKTI memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi dibanding aplikasi keuangan sebelumnya. Nugroho (2020) menambahkan bahwa tingkat kerumitan sistem sangat memengaruhi user confidence: ketika sistem

dianggap terlalu teknis, pengguna memilih metode alternatif atau menjalankan sistem secara formalitas. Tingginya complexity dalam kerangka DOI berkontribusi besar terhadap resistensi implisit pengguna.

Trialability (Kemampuan Dicoba)

Tingkat trialability dari SAKTI di Poltekkes Kemenkes Mamuju tergolong rendah. Implementasi dilakukan secara menyeluruh dan langsung tanpa fase uji coba terbatas yang memungkinkan pengguna belajar dan beradaptasi secara bertahap. Informan 3 menyampaikan: "Setelah pelatihan, langsung diterapkan. Tidak ada masa uji coba di mana staf bisa coba input data tanpa tekanan laporan."

Tidak tersedianya sandbox environment menyebabkan pengguna hanya mendapat pemahaman melalui dokumen presentasi atau pelatihan satu arah, berdampak pada rendahnya rasa percaya diri dan meningkatnya ketergantungan terhadap operator teknis. Veronika et al. (2024) menegaskan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan tanpa fase trialability cenderung diadopsi secara formalitas, sehingga sistem dijalankan hanya untuk memenuhi kewajiban administrative (Veronika et al., 2022). Hadi et al. (2024) menambahkan bahwa institusi yang menyediakan ruang pembelajaran dan simulasi terstruktur menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi karena pengguna dapat membangun pengalaman dan kepercayaan diri awal tanpa konsekuensi operasional.

Observability (Kemudahan Diamati)

Observabilitas dari manfaat sistem SAKTI masih tergolong rendah, terutama bagi pengguna dari unit non-keuangan. Informan 3 mengungkapkan: "Untuk staf di luar keuangan, mereka tidak lihat dampaknya langsung. Karena toh tetap harus kirim data lewat kertas atau file manual." Hasil positif sistem—seperti percepatan pengajuan SPM, peningkatan ketepatan laporan realisasi anggaran, dan integrasi pelaporan nasional—tidak dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh lini pengguna.

Sabani et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya observabilitas menyebabkan adopsi inovasi menjadi pasif dan tidak konsisten. Iskandar dan Amriani (2021) mencatat bahwa inovasi digital dalam birokrasi sering gagal berdifusi karena tidak disertai mekanisme performance visualization yang memungkinkan pegawai melihat kontribusi sistem terhadap kinerja institusi. Rahman et al. (2023) menyimpulkan bahwa transparansi hasil inovasi merupakan kunci keberhasilan adopsi di lembaga pemerintah.

Kendala Infrastruktur dan Solusinya

Selain hambatan dari sisi pengguna, penelitian menemukan dua kendala teknis utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi: beberapa unit kerja masih menggunakan perangkat komputer berspesifikasi rendah (RAM 2 GB) yang tidak memadai untuk menjalankan SAKTI secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh belum meratanya jaringan internet stabil di seluruh ruangan kampus. Staf IT (Informan 2) menyatakan: "Spesifikasi perangkat jadi masalah. Kadang mereka pakai komputer lama. Mau buka aplikasi saja butuh waktu."

Handayani et al. (2021) menemukan bahwa keterbatasan perangkat keras dan jaringan lokal menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas implementasi SAKTI, khususnya pada instansi di luar Pulau Jawa. Nugroho dan Lestyowati (2020) menegaskan bahwa keberhasilan teknologi tidak hanya ditentukan kualitas aplikasi, tetapi juga kesiapan lingkungan pendukung berupa infrastruktur

dan kompetensi SDM. Sebagai solusi atas kendala perangkat keras, Poltekkes Kemenkes Mamuju perlu menyusun rencana pengadaan perangkat komputer dengan spesifikasi minimal yang sesuai kebutuhan SAKTI (RAM minimal 4 GB, prosesor generasi terkini) sebagai bagian dari perencanaan anggaran belanja modal. Sementara itu, peningkatan bandwidth internet dan instalasi jaringan lokal (LAN) yang stabil di seluruh unit kerja perlu diprioritaskan sebagai infrastruktur dasar operasional sistem.

Kedua, permasalahan stabilitas koneksi jaringan dan kapasitas server. Informan 1 menjelaskan: "Kalau jaringan terganggu, kami tidak bisa akses aplikasi sama sekali. Apalagi pas akhir bulan, server pusat juga sering lambat karena semua satker serentak kirim data." Ketergantungan total pada koneksi daring tanpa mekanisme offline input menciptakan risiko disrupsi tinggi yang berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Handayani et al. (2021) merekomendasikan adanya regional server atau sistem mirror sebagai solusi desentralisasi teknis yang dapat meningkatkan ketahanan sistem di daerah. Secara praktis, Poltekkes Kemenkes Mamuju dapat mengusulkan kepada Kementerian Keuangan melalui KPPN setempat agar dijadikan prioritas dalam program peningkatan layanan dukungan teknis SAKTI di wilayah Sulawesi Barat, termasuk penyediaan helpdesk yang responsif dan jadwal pemeliharaan server yang tidak bertepatan dengan batas waktu pelaporan keuangan akhir bulan.

Resistensi Birokrasi terhadap Perubahan

Resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan non-teknis yang paling signifikan. Penelitian menemukan bahwa resistensi bersifat psikososial dan kultural, bukan semata ketidakmampuan teknis. Pegawai senior menunjukkan kecenderungan untuk menyerahkan tugas kepada pegawai muda dan preferensi tetap menggunakan metode kerja manual. Informan 2 mengonfirmasi: "Sudah pernah ikut pelatihan, tapi banyak yang cuma datang duduk-dengar. Begitu disuruh praktek, tetap bingung, tetap kembali ke cara manual."

Iskandar dan Amriani (2021) menyatakan bahwa resistensi dalam birokrasi pemerintah Indonesia bersumber dari ketidakpastian peran, ketakutan kehilangan kendali, dan rasa tidak aman terhadap kemampuan diri (Iskandar & Amriani, 2021). Gultom dan Harahap (2024) menekankan pentingnya peran pimpinan unit dalam memfasilitasi proses adaptasi, termasuk melalui pemberian insentif dan keterlibatan langsung dalam penggunaan sistem baru. Kondisi ini memerlukan intervensi strategis berupa penguatan regulasi internal, penegasan mandat penggunaan sistem, dan pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan budaya kerja (Rahman et al., 2023).

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan kerangka Diffusion of Innovations Theory, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAKTI di Poltekkes Kemenkes Mamuju masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan non-teknis sehingga belum optimal dalam mendukung tata kelola program dan penganggaran. Pertama, pemanfaatan SAKTI masih terbatas pada unit inti keuangan dan belum merata di seluruh unit kerja. Adopsi sistem bersifat administratif dan belum melembaga sebagai sistem pendukung keputusan dan koordinasi kelembagaan. Kedua, kendala utama yang ditemukan meliputi: keterbatasan SDM dalam literasi digital dan pemahaman teknis; keterbatasan infrastruktur TI berupa perangkat berspesifikasi rendah dan jaringan tidak stabil; resistensi birokrasi terhadap perubahan; minimnya fase uji coba dan pelatihan fungsional; serta kurangnya visualisasi hasil positif sistem kepada seluruh pemangku kepentingan.

Analisis melalui lima atribut DOI mengungkap bahwa rendahnya relative advantage yang dirasakan, lemahnya compatibility dengan praktik kerja yang ada, tingginya complexity sistem, minimnya trialability, dan rendahnya observability secara kolektif menghambat difusi inovasi secara menyeluruh di dalam organisasi. Optimalisasi implementasi SAKTI memerlukan pendekatan menyeluruh: (1) penyelenggaraan pelatihan berkala berbasis praktik kerja nyata; (2) pembaruan perangkat keras minimal di setiap unit kerja dan perbaikan infrastruktur jaringan; (3) penyediaan sandbox environment untuk pembelajaran sistem yang aman; (4) penguatan komunikasi organisasi mengenai manfaat nyata sistem; dan (5) pembangunan mekanisme performance visualization lintas fungsi untuk meningkatkan observabilitas hasil positif SAKTI.

Daftar Pustakan

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada penyusunan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 13. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846>
- Hadi, M., Ambarwati, R. D., Sugiyanto, H., & Khuluq, A. (2024). Determinant Analysis of SAKTI Implementation (Delone and Mclean Information System Success Model Approach). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/reaksi.v9i2.5429>
- Handayani, F., Fauziah, S., Afandi, A., Suwarno, C. A., & Sugiyanto. (2021). SAKTI: Innovation on Digitizing State Financial Management Web-Based in Indonesia. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(1), 1–3.
- Iskandar, A., & Amriani, T. N. (2021). Determinant analysis of the net benefits of the use of SAKTI: User satisfaction mediation. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(2), 109–128. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i2.2418>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peluncuran SAKTI tandai integrasi sistem pengelolaan keuangan pemerintah*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3842>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (Pearson (ed.); 16th ed.).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny Saldaña. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, H., & Lestyowati, J. (2020). Analisis tingkat kepuasan dan kepentingan pengguna aplikasi SAKTI dengan PIECES framework. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 93–104. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.188>
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiabd.v14i2>
- Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3901>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sabani, A., Thai, V., & Hossain, M. A. (2023). Factors Affecting Citizen Adoption of E-Government in Developing Countries: An Exploratory Case Study From Indonesia. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 31(1), 23. <https://doi.org/10.4018/JGIM.318131>
- Veronika, M. W., Putri, A. M., & Suci, R. G. (2022). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *ACCOUNTIA Journal: Accounting, Trusted, Inspiring and Authentic Journal*, 6(2), 205–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.35915/accountia.v6i2.681>
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an equitable recovery*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1730-4>